

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sasaran pembangunan nasional Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam mencapai sasaran tersebut maka pemerintah melakukan upaya yang berfokus pada peran serta rakyat dengan meningkatkan kinerja perekonomian agar mampu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan produktivitas rakyat. Upaya tersebut dilaksanakan secara merata, terarah, terencana dan sistematis agar dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum tujuan bangsa Indonesia pada alinea keempat adalah “memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kesimpulan dari sasaran pembangunan ekonomi adalah untuk menaikkan tingkat kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kinerja perekonomian yang diartikan sebagai peningkatan pendapatan. Pembangunan diselenggarakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan memprioritaskan kebutuhan tiap-tiap daerah sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan melalui pembangunan baik secara jangka panjang maupun jangka pendek. Tujuan dari pembangunan itu sendiri adalah untuk menanggulangi kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah dengan upaya meningkatkan pendapatan dan pemerataan secara nasional dan

daerah, maka salah satu indikator yang menjadi penentu keberhasilan pembangunan nasional adalah menurunnya laju kemiskinan.

Kemiskinan merupakan penyakit dalam perekonomian yang bersifat multidimensional. Upaya dalam mengatasi kemiskinan menjadi hal yang rumit bahkan menjadi salah satu program prioritas. Oleh karena itu, upaya mengatasi kemiskinan sebaiknya dilakukan secara komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan dilaksanakan secara terpadu (M. Nasir, dkk 2008).

Upaya pemulihan ekonomi yang dilakukan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatasi masalah kemiskinan melalui kebijakan-kebijakan dan program pembangunan yang telah disepakati, pada kenyataannya masih belum memberikan hasil yang optimal karena akar permasalahan dari kemiskinan belum terpecahkan. Oleh karena itu, diidentifikasi terlebih dahulu masalah-masalah yang terdapat dalam ruang lingkup kemiskinan tersebut, seperti: dimana penduduk miskin berada, kemiskinan tersebut terlihat paling besar pada kelompok mana saja, hal tersebut dapat dilihat dari garis kemiskinan yang digunakan, dan siapakah yang tergolong penduduk miskin. Menurut BPS (2013), seseorang tergolong ke dalam penduduk miskin jika rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan.

Tabel 1.1
Persentase Penduduk Miskin di Pulau Jawa Tahun 2007-2012

No	Provinsi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Rata-rata
1	DKI Jakarta	4,61	4,29	3,62	3,48	3,75	3,69	3,91
2	Jawa Barat	13,55	13,01	11,96	11,27	10,65	10,09	11,75
3	Jawa Tengah	20,43	19,23	17,72	16,56	15,76	15,34	17,51
4	DI Yogyakarta	18,99	18,32	17,23	16,83	16,08	16,05	17,25
5	Jawa Timur	19,98	18,51	16,68	15,26	14,23	13,40	16,34
6	Banten	9,07	8,15	7,64	7,16	6,32	5,85	7,37

Sumber: BPS, 2013

Dilihat dari data tabel 1.1, rata-rata jumlah penduduk miskin yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa adalah provinsi Jawa Tengah yaitu sebesar 17,51 persen. Sedangkan rata-rata jumlah penduduk miskin yang paling rendah di Pulau Jawa ditempati oleh provinsi DKI Jakarta dengan rata-rata jumlah penduduk miskin sebesar 3,91 persen. Nilai rata-rata jumlah penduduk miskin tersebut diperoleh dari persentase penduduk miskin tahun 2007-2012.

Upaya pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di provinsi Jawa Tengah memperlihatkan keberhasilan walaupun belum sepenuhnya berhasil. Namun seperti yang terlihat pada grafik 1.1 bahwa persentase penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun mengalami penurunan secara bertahap yaitu 20,43 persen pada tahun 2007 dan pada tahun 2012 tingkat penduduk miskin

di provinsi Jawa Tengah sebesar 15,34 persen. Dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau Jawa angka jumlah penduduk miskin tersebut cukup besar.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk Miskin di Jawa Tengah
Tahun 2007-2012

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (000)
2007	6.557,2
2008	6.189,6
2009	5.725,7
2010	5.369,20
2011	5.107,36
2012	4.977,40

Sumber: BPS, 2013

Dari data terlihat bahwa setiap tahunnya jumlah penduduk miskin di Jawa Tengah mengalami penurunan akan tetapi penurunannya belum signifikan. Pada periode 2007-2009 terjadi penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 831,5 ribu jiwa, yaitu 6.557,2 ribu jiwa pada tahun 2007 menjadi 5.725,7 ribu jiwa di tahun 2009.

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi persentase kemiskinan. Apabila jumlah penduduk diimbangi dengan kualitas yang memadai maka hal tersebut menjadi modal pembangunan yang handal, namun apabila kualitas tersebut tidak memadai justru akan menjadi beban pembangunan. Pertumbuhan penduduk yang semakin cepat akan berdampak bagi penduduk miskin apalagi mereka tidak memiliki lahan dan alat produksi sendiri. Teori

Malthus dalam Durrotul Mahsunah (2013) menyatakan bahwa sumber daya bumi tidak bisa mengimbangi kebutuhan populasi yang terus bertambah, akibatnya kebutuhan manusia yang bersifat tidak terbatas berbanding terbalik dengan jumlah sumber daya alam yang digunakan sebagai alat pemuas kebutuhan manusia yang bersifat terbatas. Hal ini akan mendorong manusia mendekati garis kemiskinan karena persaingan dalam pemenuhan kebutuhan.

Pertumbuhan ekonomi menjadi syarat utama bagi semua negara agar terciptanya penurunan kemiskinan walaupun pada kenyataannya masih banyak negara dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi namun tidak terlalu berpengaruh terhadap penurunan kemiskinan jika tidak diiringi dengan pertumbuhan PDRB yang melebihi laju pertumbuhan penduduk dan pemerataan pendapatan. Pembangunan ekonomi mencapai optimal jika peningkatan pendapatan nasional disertai dengan pemerataan pendapatan bagi seluruh kelompok masyarakat (Tambunan dalam Dian Octaviani, 2001).

Gambaran secara menyeluruh tentang kondisi perekonomian suatu daerah diperoleh dari besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu indikator makro ekonomi, pada dasarnya PDRB merupakan penjumlahan barang dan jasa akhir yang dihasilkan dari kegiatan perekonomian oleh sektor industri, sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat di masing-masing daerah/provinsi mengindikasikan bahwa pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi jumlah penduduk miskin.

Tabel 1.3
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2000
(Tanpa Migas) Jawa Tengah Tahun 2007-2012 (Milyar Rupiah)

Tahun	PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000
2007	159.110,25
2008	168.034,48
2009	176.673,46
2010	186.992,99
2011	198.270,12
2012	210.848,42

Sumber: BPS Indonesia, 2013

Faktor lain yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin adalah Upah Minimum. Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 7 Tahun 2013, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman. Tunjangan tetap yang dimaksud adalah jumlah imbalan yang pembayarannya dilakukan dengan teratur yang diterima pekerja/buruh secara tetap tanpa dikaitkan dengan kehadiran dan prestasi. Penetapan upah minimum didasarkan pada Kebutuhan Hidup Layak (KHL) dengan memperhatikan produktifitas dan pertumbuhan ekonomi. Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2005 (Per-17/Men/VIII/2005). Kebutuhan Hidup Layak (KHL) adalah standar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak baik secara fisik, non fisik dan sosial, untuk kebutuhan 1 (satu) bulan. KHL sebagai dasar dalam

penetapan upah minimum merupakan peningkatan dari kebutuhan hidup minimum. Apabila kebutuhan hidup minimum dapat terpenuhi maka kesejahteraan pekerja/buruh meningkat dan terbebas dari kemiskinan. Dengan demikian, upah berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Pendidikan dijadikan *pioneer* dalam pembangunan bangsa karena pendidikan merupakan faktor yang sangat penting dalam menanggulangi kemiskinan melalui investasi pembentukan modal manusia (*human capital*) dan pengembangan produktivitas manusia. Adanya perluasan di bidang pendidikan akan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan keterampilan bagi angkatan kerja dan menciptakan kualitas sumber daya manusia yang produktif serta mendorong peningkatan produktivitas kerjanya. Rendahnya produktivitas kaum miskin dapat disebabkan oleh rendahnya akses mereka untuk memperoleh pendidikan (Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga, 2004). Produktivitas dapat diukur dengan hasil output yang diperoleh tergantung pada kualitas sumber daya manusia itu sendiri sehingga tenaga kerja yang mempunyai produktivitas yang lebih tinggi tentu akan menghasilkan output yang lebih banyak dan memberikan keuntungan yang besar bagi perusahaan sehingga perusahaan bersedia untuk memberikan upah yang lebih tinggi. Dengan demikian tenaga kerja yang memiliki produktivitas tinggi akan mendapatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik melalui peningkatan pendapatannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas bahwa provinsi Jawa Tengah mengalami penurunan jumlah penduduk miskin yang relatif kecil pada periode tahun 2007-2012. Pada kenyataannya PDRB di provinsi tersebut

terbilang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan PDRB di atas 5 persen, dan rata-rata jumlah penduduk provinsi Jawa Tengah adalah yang paling tinggi dibandingkan dengan provinsi lain di pulau Jawa. Oleh karena itu, penulis bermaksud meneliti variabel-variabel yang diduga mempengaruhi jumlah penduduk miskin di provinsi Jawa Tengah dengan Judul “Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Upah Minimum, dan Tingkat Pendidikan terhadap Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten/Kota Jawa Tengah Tahun 2007-2012”.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu dari berbagai hal yang telah diuraikan di atas, maka dalam penulisan penelitian ini, permasalahan yang akan dianalisis adalah bagaimana pengaruh jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), upah minimum, dan tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2007-2012.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), upah minimum, dan tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Jawa Tengah tahun 2007-2012.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis atau Akademis

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan kegunaan secara teoritis dan akademis. Diharapkan akan memberikan bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Ekonomi Universitas Pasundan mengenai pengaruh jumlah penduduk, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), upah minimum, dan tingkat pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota Jawa Tengah.

1.4.2 Kegunaan Praktis atau Empiris

Berdasarkan penjelasan di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan berbagai masukan dan informasi kepada:

1. Pemerintah serta pihak-pihak terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran bagi pemerintah serta pihak-pihak terkait sebagai pilihan pengambilan kebijakan dalam mengatasi kemiskinan.
2. Para peneliti lain, penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu saran dan rekomendasi, serta sebagai rujukan dalam penelitian-penelitian selanjutnya.